

**PENGARUH PERSEPSI SISTEM
PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK,
DISKRIMINASI PAJAK DAN PEMAHAMAN
PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU
PENGGELAPAN PAJAK
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi
Terdaftar di KPP Pratama Purworejo)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

MUHAMMAD ARY WICAKSONO
NIM. 12030110141016

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Muhammad Ary Wicaksono

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141016

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH PERSEPSI SISTEM
PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK,
DISKRIMINASI PAJAK DAN
PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP
ETIKA KEWAJIBAN PAJAK
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang
Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo)**

Dosen Pembimbing : Dul Muid, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 19 September 2014

Dosen Pembimbing,

(Dul Muid, S.E., M.Si., Akt)

NIP. 196505131994031002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Muhammad Ary Wicaksono

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141016

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH PERSEPSI SISTEM
PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK,
DISKRIMINASI PAJAK DAN
PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP
ETIKA KEWAJIBAN PAJAK (Studi Empiris
pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang
Terdaftar di KPP Pratama Purworejo)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 30 September 2014

Tim Penguji

1. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt (.....)

2. Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt (.....)

3. Fuad S.E.T, M.Si., Akt., Ph.D (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Muhammad Ary Wicaksono, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **PENGARUH PERSEPSI SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK, DISKRIMINASI PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU PENGHELAPAN PAJAK (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Purworejo)** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 22 September 2014

Yang membuat pernyataan,

(Muhammad Ary Wicaksono)
NIM: 12030110141016

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” (Q.S Al Insyirah : 5-8)

Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta :

Yudi dan Ardiyah Sujaningsih

Dan adik saya :

Muhammad Dwi Rifqi

ABSTRACT

This study aims to analyze factors that affect to perception of tax evasion. These factors are the tax system, tax fairness, tax discrimination and understanding of taxation. The population of this study is the individual taxpayer who registered in KPP Pratama Purworejo.

The sampling technique in this study used convenience sampling method, where the data obtained from questionnaires. Determination of the sample numbers used the formula of slovin 100 respondents the hypothesis of this study was used to examine the relationship between the variables above. Data analysis in this study assisted by SPSS software.

The result of this study are follows : (1) tax system on perception of ethical behavior of tax evasion is negative and significant, (2) tax fairness on perception of ethical behavior of tax evasion is positive and significant, (3) tax discrimination on perception of ethical behavior of tax evasion is positive and significant, (4) understanding of taxation on perception of ethical behavior of tax evasion is not significant.

Keywords: *tax system, tax fairness, tax discrimination, understanding of taxation, perception of tax evasion.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi penggelapan pajak. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi pajak dan pemahaman perpajakan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo.

Teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah teknik *convenience sampling* dan data didapat dengan penyebaran kuisioner. Penentuan jumlah sampling menggunakan rumus slovin yang diperoleh sebanyak 100 responden. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak, (2) keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak, (3) diskriminasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak dan (4) pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.

Kata kunci: sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi pajak, pemahaman pajak, persepsi penggelapan pajak.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Puji syukur penulis panjatkan atas berkat rahmat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi etis wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak sebagai prasyarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis meyakini kesulitan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
3. Prof. Dr. H. Muhammad Syafruddin, M.Si., Akt, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Dul Muid, Se., M.Si., Akt, selaku dosen pembimbing yang selama proses penyusunan skripsi telah memberikan pengarahan, petunjuk dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Marsono, S.E., M.Adv. Acc., Akt, selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan pengajaran dan bekal ilmu pengetahuan serta seluruh staf tata usaha dan perpustakaan atas segala bantuan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
7. Kedua orang tua tersayang, Bapak Yudi dan Ibu Ardiyah Sujaningsih serta adikku Muhammad Dwi Rifqi, terima kasih atas seluruh doa dan semangat yang telah diberikan hingga hari ini kepada penulis.

8. Bapak Muhammad Riza Pahlevi selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo, Mas Husni dan seluruh jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga Kos ungu, Bapak Sugimin, Ibu Siti, Emil, Fadil, Daru, Janwar, Tiko, Bobby, Robby, Mudas, Ferry, Husni, Surpin, Geri, Tito, Wibi, dan semua anak kos yang baru yang telah memeberikan kebersamaan dan semangat selama ini.
10. Nandha Rakhmalia Sukma dan Dewi Nindyastuti, terima kasih sudah menemani saya mulai awal kuliah, telah memberikan banyak kenangan selama di bangku kuliah. Terima kasih atas support kalian selama ini.
11. Endin, Diana, Duma, Ega, Ashim, Rudy, Aldo, Prama, Latip, Abi, Raymond dan Tato yang telah menjadi sahabat terbaik saya mulai awal kuliah hingga saat ini.
12. Ikhtiar Dian, Nabel, Fidel, Aluh, Silvy yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini, dan terima kasih.
13. Tim KKN I UNDIP Kecamatan Kangkung, Kendal, khususnya Desa Jungsemi. Nanda, Nia, Elsa, Gugun, Cahyono, Grace, Imam, Dewi, Adel dan Fajar yang telah menempuh 35 hari bersama dalam suka dan duka, terima kasih.
14. Seluruh keluarga besar Akuntansi FEB Undip 2010 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, untuk kebersamaannya dan teman berbagi ilmu serta pengalaman dari awal perkuliahan sampai saat ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik atas skripsi ini.

Semarang, 22 September 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Persepsi	10
2.1.2 <i>Theory of Reasoned Action</i>	12
2.1.3 Etika	13
2.1.4 Penggelapan Pajak	14
2.1.5 Sistem Perpajakan	17
2.1.6 Pemahaman Perpajakan	18
2.1.7 Keadilan Pajak	19
2.1.8 Diskriminasi Pajak	22
2.2 Penelitian Terdahulu	22

2.3	Kerangka Pemikiran	26
2.4	Pengembangan Hipotesis	27
2.4.1	Pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak	27
2.4.2	Pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak	28
2.4.3	Pengaruh diskriminasi pajak terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak	29
2.4.4	Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak	30
2.4.5	Pengaruh simultan variabel independen terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak	31
BAB III METODE PENELITIAN.....		32
3.1	Variabel Penelitian	32
3.1.1	Sistem perpajakan	32
3.1.2	Keadilan pajak	33
3.1.3	Diskriminasi pajak	34
3.1.4	Pemahaman perpajakan	34
3.1.5	Persepsi atas perilaku penggelapan pajak.....	35
3.2	Populasi dan Sampel	37
3.3	Jenis dan Sumber Data	38
3.4	Metode Pengumpulan Data	39
3.5	Metode Analisa Data	39
3.5.1	Statistik deskriptif	39
3.5.2	Uji kualitas data	40
3.5.3	Uji normalitas.....	40
3.5.4	Uji hipotesis	41
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		43
4.1	Gambaran Objek Penelitian	43
4.1.1	Sampel penelitian	43
4.1.2	Identitas responden	44
4.2	Analisa Data	46
4.2.1	Statistik deskriptif	46
4.2.2	Uji kualitas data	48
4.2.3	Uji analisis data	53
4.2.4	Pengujian hipotesis	54
4.3	Intepretasi Hasil	59
4.3.1	Sistem perpajakan	59
4.3.2	Keadilan pajak	60
4.3.3	Diskriminasi pajak	61
4.3.4	Pemahaman perpajakan	61

BAB V PENUTUP	63
5.1 Simpulan	63
5.2 Keterbatasan Penelitian	64
5.3 Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Definisi Operatif Pengukuran Variabel	36
Tabel 3.2 Kerangka Populasi di Kantor Pajak Pratama Purworejo	37
Tabel 4.1 Data Pengambilan Kuisioner	44
Tabel 4.2 Karakteristik Responden	45
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif	46
Tabel 4.4 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Koefisien Validitas Variabel Sistem Perpajakan	48
Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Koefisien Validitas Variabel Keadilan Pajak	49
Tabel 4.6 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Koefisien Validitas Variabel Diskriminasi Pajak	49
Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Koefisien Validitas Variabel Pemahaman Perpajakan	50
Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Koefisien Validitas Variabel Etika Penggelapan Pajak	50
Tabel 4.9 Rekapitulasi Uji Reliabilitas	51
Tabel 4.10 Uji Normalitas	53
Tabel 4.11 Uji R Square dan Uji F dari Regresi Berganda	55
Tabel 4.12 Transformasi Koefisien Regresi Berganda R ke dalam Uji F	56
Tabel 4.13 Rekapitulasi Perhitungan <i>t-value</i>	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	26

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Surat Izin Penelitian	70
Lampiran B Kuisisioner Penelitian	72
Lampiran C Hasil Olah Data Statistik	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang berkembang. Dalam menjalankan sistem kenegaraannya, Indonesia membutuhkan dana yang didapat dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu pendapatan negara Indonesia dan terbesar dari total pendapatan negara adalah dari pendapatan pajak. Menurut Soemitro (1992), pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang - undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal jasa (kontrapretasi) secara langsung serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Perpajakan Indonesia sendiri dikelola pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang berada di bawah Departemen keuangan.

Indonesia dalam sistem perpajakannya menganut *Self Assessment System*, yaitu dimana para Wajib Pajak berperan secara aktif dalam aktivitas pajaknya sendiri. Jadi Ditjen Pajak hanya bertugas mengawasi dan memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan - ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi (Suminarsasi, 2011:1). Hal tersebut menjadi kendala dari sistem perpajakan Indonesia pada saat ini.

Belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia salah satunya dipengaruhi dari buruknya administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan berkorelasi langsung dengan tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*) dan korupsi pajak. Hal ini dapat dilihat dari besarnya *tax gap*, yaitu selisih antara kewajiban pajak yang sebenarnya dengan pajak yang dibayarkan. Menurut Ditjen Pajak (2012), jumlah pajak yang terkumpul mencapai Rp 976 Triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 19 persen dari tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 2009 - 2012 mencapai 17 persen. Persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2012 masih tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Data yang didapat oleh Ditjen pajak pada tahun 2012 menyatakan bahwa orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya atau melapor surat pemberitahuan (SPT) pajak npenghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7 persen. Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mau mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak atau melapor surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilannya hanya 520 ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen. Dari penelitian Putra (2011), yang meneliti tentang pengaruh penggelapan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak menyimpulkan bahwa penggelapan pajak berpengaruh

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini membuktikan bahwa penggelapan pajak di Indonesia berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindakan pidana karena merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfully*), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (*inherent*) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yudiriksi. penggelapan pajak mempunyai risiko terdeteksi yang *inherent* pula, serta mengundang sanksi pidana badan dan denda. Tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk meminimalkan risiko terdeteksi biasanya para pelaku penggelapan pajak akan berusaha menyembunyikan atau menghamburkan asal-usul hasil kejahatan dengan melakukan tindakan kejahatan lanjutannya yaitu praktik pencucian uang agar dapat memaksimalkan *utilitas ekspetasi* pendapatan dari penggelapan pajak tersebut (Duaji, 2009).

Untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan, Wajib Pajak membuat perencanaan pajak *tax planning* yang bertujuan untuk menghindari pajak (*Tax Avoidance*) maupun penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Meskipun keduanya mempunyai tujuan untuk mengurangi jumlah pajaknya, namun karakter dari keduanya berbeda. *Tax Avoidance* diartikan sebagai kegiatan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di negaranya. Sulitnya penerapan *Tax Avoidance* membuat seorang Wajib Pajak cenderung untuk melakukan *tax evasion*, yaitu melakukan penghematan dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak (Ayu, 2009:2).

Menurut Zain (2008), pembicaraan mengenai masalah perpajakan selalu didahului dengan menentukan terlebih dahulu kebijakan perpajakan (*tax policy*), kemudian kebijakan perpajakan tersebut diolah dan ditetapkan dalam bentuk undang-undang perpajakan (*tax law*) dan barulah kemudian dibahas masalah yang menyangkut pemungutannya oleh aparat perpajakan yang termasuk dalam ruang lingkup administrasi perpajakan (*tax administration*). Ketiga unsur sistem perpajakan tersebut saling tergantung satu sama lainnya dan untuk mencapai suatu sistem perpajakan yang sehat secara menyeluruh diperlukan kesadaran yang lebih tinggi akan saling ketergantungan tersebut.

Pada saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang mengembangkan sistem pendukung yang diharapkan akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung, melaporkan dan membayarkan pajaknya, yaitu dengan adanya *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box*, dan *e-banking*. Sebelum adanya sistem yang sedang dikembangkan sekarang oleh Direktorat Jenderal Pajak saat ini, wajib pajak diharuskan datang ke KPP terdekat untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya. Namun saat ini dengan sistem baru yang berbasis internet tersebut wajib pajak tidak perlu datang ke KPP terdekat. Dengan adanya pembaharuan sistem ini persepsi wajib pajak mengenai sistem perpajakan akan meningkat seiring dengan kemudahannya dalam melakukan kewajiban pajak.

Tax payer factors merupakan faktor yang melekat pada wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak menganggap *tax payer factors* merupakan faktor yang bersifat *uncontrollable*, sedangkan faktor *tax law*, *tax policy*, dan *tax administration* bersifat *controllable* (Suyatmin, 2004). Wajib pajak tidak boleh

diperlakukan sebagai obyek tetapi sebagai subyek yang harus dibina agar bersedia, mampu, dan sadar melaksanakan kewajiban perpajakan (Syofyan, 2003). Hal ini perlu dilakukan karena faktor yang melekat pada wajib pajak dan diduga berpengaruh kuat terhadap kepatuhan wajib pajak yang sulit dipengaruhi dan dikendalikan.

McGee (2009), mengaitkan sistem perpajakan dengan tarif pajak dan kemungkinan korupsi dalam sistem apapun. Gambaran mengenai sistem pajak yaitu mengenai tinggi rendahnya tarif pajak dan kemanakah iuran pajak yang terkumpul, apakah benar-benar digunakan untuk pengeluaran umum, ataukah justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak memiliki peran penting bagi wajib pajak dalam mengambil keputusan akan membayar atau tidak membayar pajak mereka.

Pada tahun 2012, Kantor Pelayanan Pajak Purworejo menjadi Kantor Pelayanan Pajak terbaik di wilayah kanwil Jawa Tengah, dimana jumlah Wajib Pajak yang memasukan SPT di Kabupaten Purworejo melampaui realisasi nasional. Yakni, pada tingkat nasional realisasinya 70 persen, sedangkan KPP Pratama Purworejo mencapai 79 persen dengan total Wajib Pajak di Purworejo sekitar 56.000 orang (Suara merdeka, 2013).

Jumlah realisasi dari tiap kantor pajak dapat dilihat dari jumlah banyaknya wajib pajak yang terdaftar di kantor pajak tersebut dan dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang menyamapikan SPT selama periode tertentu. Jumlah realisasi tersebut menggambarkan jumlah wajib pajak yang patuh dalam menjalankan kegiatan perpajakannya. Dalam hal ini, kegiatan perpajakannya

meliputi mendaftarkan, melaporkan dan membayar pajaknya dengan baik sesuai dengan sistem dan peraturan yang ada. Karena Indonesia menganut *self assessment system*, dimana wajib pajak dituntut untuk berperan aktif dalam kegiatan pajaknya, maka perlunya ada pemahaman yang baik dari wajib pajak terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang ada.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel-variabel terikat seperti sistem perpajakan, keadilan dalam perpajakan, perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh aparat pajak dan tingkat pemahaman perpajakan yang baik dapat mempengaruhi persepsi penggelapan pajak. Variabel bebas yang telah disebutkan sebelumnya berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diusulkan bahwa variabel persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak sebagai variabel terikat, dimana perilaku penggelapan pajak merupakan salah satu bentuk ketidakpatuhan pajak. Kegiatan penggelapan pajak dianggap sebagai suatu kegiatan yang tidak etis untuk dilakukan karena sangat merugikan negara. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Prasetyo (2010), yang menyatakan bahwa 85,74% pegawai swasta tidak setuju dengan adanya berbagai bentuk praktek penggelapan pajak; 82,13% wiraswasta tidak setuju dengan adanya berbagai bentuk praktek penggelapan pajak dan 95,56% pegawai negeri sipil tidak setuju dengan adanya berbagai bentuk praktek penggelapan pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011), yang dilakukan di Yogyakarta dengan mengungkapkan

bahwa keadilan pajak dan diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak, serta sistem perpajakan yang berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Penggelapan pajak di Indonesia memang masih sering dilakukan, baik oleh Wajib Pajak maupun dari aparat pajak sendiri. Baru-baru ini banyak kasus-kasus perpajakan yang dilakukan oleh aparat pajak yang akhirnya diketahui dan ditindak lanjut oleh pengadilan ke persidangan. Adapun perlakuan penggelapan pajak (*tax evasion*) dipengaruhi oleh berbagai hal seperti pemahaman perpajakan yang minim, pelayanan aparat pajak yang tidak optimal dan sanksi yang tidak menimbulkan efek jera sehingga timbul peluang melakukan penggelapan pajak (Izzah (2008) dalam Rahmadi, 2014).

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai sistem perpajakan berpengaruh atas berperilaku penggelapan pajak?
2. Apakah persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai keadilan pajak berpengaruh atas berperilaku penggelapan pajak?
3. Apakah persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai diskriminasi pajak berpengaruh atas berperilaku penggelapan pajak?
4. Apakah persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai pemahaman perpajakan berpengaruh atas berperilaku penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak;
2. Untuk menganalisis pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi Wajib Pajak Orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak;
3. Untuk menganalisis pengaruh diskriminasi pajak terhadap persepsi Wajib Pajak Orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak; dan
4. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggelapan pajak agar perlakuan penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat diminimalkan; dan
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perilaku penggelapan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi tentang gambaran singkat mengenai isi dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka berisi konsep dan teori yang melandasi penelitian ini yang mencakup landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menjelaskan secara detail mengenai metode-metode dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab pembahasan dan hasil penelitian berisi deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil yang telah dikumpulkan.

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisis simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori berisi penjelasan mengenai teori-teori dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

2.1.1 Teori persepsi

Sebelum memahami persepsi tentang perilaku penggelapan pajak, kita harus mengerti arti dari persepsi yang telah dikemukakan oleh beberapa para ahli. Persepsi memiliki berbagai pengertian menurut para ahli antara lain:

1. Menurut Hanurawan (2007: 22) “persepsi adalah sejenis aktivitas pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya”.
2. Menurut Thoha (2004: 141) persepsi pada hakikatnya adalah “proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman”.
3. Krech (dalam Thoha, 2004: 142) persepsi adalah “suatu proses kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang barangkali sangat berbeda dari kenyataannya”.

Persepsi juga timbul dari beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Vincent (Manajemen Bisnis Total, 1997, hal 35) adalah sebagai berikut:

1. Pengalaman masa lalu (terdahulu) dapat mempengaruhi seseorang karena manusia biasanya akan menarik kesimpulan yang sama dengan apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan.
2. Keinginan dapat mempengaruhi persepsi seseorang dalam hal membuat keputusan. Manusia cenderung menolak tawaran yang tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan.
3. Pengalaman dari teman-teman, dimana mereka akan menceritakan pengalaman yang telah dialaminya. Hal ini jelas mempengaruhi persepsi seseorang.

Selain itu menurut Thoha (1993), bahwa persepsi pada umumnya terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, misalnya sikap, kebiasaan, dan kemauan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu yang meliputi stimulus itu sendiri, baik sosial maupun fisik.

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa persepsi adalah suatu asumsi atau suatu informasi dari seseorang yang didapat dari pengalaman masa lalu yang dirasakan sendiri oleh indera orang tersebut, keinginan seseorang dalam membuat keputusan dan dari informasi yang diberikan oleh orang lain. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa persepsi penggelapan pajak timbul akibat pengalaman Wajib Pajak itu sendiri, dari keinginan Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak terhadap perpajakan Indonesia yang membuat persepsi tentang penggelapan pajak dianggap sebagai hal yang wajar.

2.1.2 *Theory of Reasoned Action*

Theory of Reasoned Action (TRA) atau Teori Tindakan Beralasan atau Teori Aksi Beralasan mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku melalui suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, dan dampaknya terbatas hanya pada tiga hal. Pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tetapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu. Kedua, perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap tetapi juga norma subyektif (*subjective norms*), yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita lakukan. Ketiga, sikap terhadap suatu perilaku bersama-sama norma subyektif membentuk suatu intensi atau niat untuk berperilaku tertentu. Intensi atau niat merupakan fungsi dari dua determinan dasar, yaitu sikap individu terhadap perilaku (merupakan aspek personal) dan persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau untuk tidak melakukan perilaku yang disebut dengan norma subyektif.

Tujuan dari perilaku, menurut Fishbein dan Ajzen (1980), merupakan kekuatan seseorang untuk melakukan tindakan yang ditentukan. Tujuan perilaku tersebut didefinisikan sebagai perasaan positif dan negatif mengenai suatu tindakan. Norma subyektif diartikan sebagai persepsi seseorang bahwa kebanyakan orang adalah penting baginya untuk memperkirakan perlu atau tidaknya melakukan suatu tindakan.

Relevansi dari *Theory of Reasoned Action* dengan penelitian ini adalah seseorang dalam menentukan perilaku untuk menggelapkan pajak dipengaruhi

oleh rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak serta pengaruh lingkungan yang berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku.

2.1.3 Etika

Secara etimologi etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “Ethos” yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (*Custom*). Etika biasanya berkaitan dengan moral yang merupakan istilah dalam bahasa latin, yaitu “mos” yang dalam bentuk melakukan perbuatan baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk.

Menurut Maryani & Ludigdo (2001), etika adalah Seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi. Selain itu Sidik (2007), berpendapat bahwa etika dapat dikelompokkan menjadi dua definisi yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Etika merupakan karakter individu, dalam hal ini termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik, dan
2. Etika merupakan hukum sosial. Sifat dasar etika adalah sifat kritis, etika bertugas:
 - a. Untuk mempersoalkan norma yang dianggap berlaku;
 - b. Etika mengajukan pertanyaan tentang legitimasinya;
 - c. Etika mempersoalkan pula hak setiap lembaga seperti orangtua, sekolah, negara dan agama untuk memberikan perintah atau larangan yang harus ditaati;
 - d. Etika dapat mengantarkan manusia pada sifat kritis dan rasional; dan

- e. Etika menjadi alat pemikiran yang rasional dan bertanggung jawab bagi seorang ahli dan bagi siapa saja yang tidak mau diombang-ambingkan oleh norma-norma yang ada.

Menurut Sumaryono (1995), etika berkembang menjadi studi tentang manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan manusia pada umumnya. Selain itu etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia. Syarat timbulnya persepsi yakni, adanya objek, adanya perhatian sebagai langkah pertama untuk mengadakan persepsi, adanya alat indra sebagai reseptor penerima stimulus yakni saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak dan dari otak dibawa melalui saraf motoris sebagai alat untuk mengadakan respon (Sunaryo, 2004).

2.1.4 Penggelapan pajak

Untuk melakukan kegiatan perpajakan, wajib pajak dapat melakukan *tax planning* atau perencanaan pajak. *Tax planning* ini dilegalkan oleh pemerintah selama masih berada dalam peraturan perpajakan. Menurut Mangoting (1999) dalam Adiatma (2013), manfaat perencanaan pajak yaitu :

- a. Penghematan kas keluar, karena pajak merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi.
- b. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat

pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas yang lebih akurat.

Lumbantoruan (1996) dalam Adiatma (2013), menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak, diantaranya yaitu:

- a. Pergeseran pajak (*tax shifting*) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak dimungkinkan sekali tidak menanggung beban pajaknya.
- b. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli.
- c. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- d. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dilakukan dengan cara memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya.
- e. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang riil yang dapat diterima oleh fiskus. Suandy (2008)

menyebutkan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah rekayasa *tax affairs* yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada.

Menurut Mardiasmo (2009), penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para Wajib Pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Menurut Wallschutzki beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Nurmantu, 2004:26), adalah sebagai berikut:

1. Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu.
2. Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil.
3. Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada resikonya.
4. Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat.
5. Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh Wajib Pajak.
6. Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi

Secara psikologis dan sadar hukum, Wajib Pajak yang melakukan penggelapan pajak umumnya bertujuan untuk menghindari jumlah pajak terutang

yang harus disetorkan ke kas negara. Menurut Resmi (2009), sosialisasi akan Undang-Undang Perpajakan dan sanksi yang dikenakan apabila melanggar ketentuan perpajakan, diharapkan dapat menjadi solusi atas kasus kasus penggelapan pajak. Ditambah dengan sistem perpajakan yang sederhana dan mudah dipahami, akan memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai, sehingga akan memberikan dampak positif bagi para Wajib Pajak untuk meningkatkan pemahaman perpajakan dan kesadaran dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

2.1.5 Sistem Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2009:9), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, *With Holding System*. Sistem yang dipakai oleh Indonesia dalam sistem perpajakannya memakai *self assessment system*, dimana Wajib Pajak yang berperan aktif dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya. Pemerintah dalam melaporkan dan membayar pajaknya, pemerintah dalam hal ini hanya sebagai pengawas dari jalannya kegiatan perpajakan. Hal ini diperkuat oleh Zain (2008), bahwa perencanaan pajak tidak pula terlepas dari sistem pungutan yang dianut di Indonesia setelah reformasi pajak, yaitu sistem *self-assessment*. Ciri dan cara tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah :

- a) Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-

sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional;

- b) Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya, berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan
- c) Anggota masyarakat Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang (*self assessment*). Maka, melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Berdasarkan ketiga prinsip pemungutan pajak tersebut, Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak sendiri.

2.1.6 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman akan peraturan perpajakan erat kaitannya dengan pembayaran pajak. Resmi (2009), mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak memahami tentang

perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah (1) Wajib Pajak harus memiliki NPWP dan (2) Wajib Pajak harus melaporkan SPT. Syarat-syarat tersebut dapat dijadikan indikator kemauan membayar pajak oleh Wajib Pajak dikarenakan, pertama, Wajib Pajak apabila ada Wajib Pajak baru yang akan membayar pajak, harus mendaftarkan diri terlebih dahulu agar mendapatkan NPWP. Selanjutnya Wajib Pajak lama yang telah memiliki NPWP harus memperbarui kepemilikan tersebut agar dapat membayar pajak secara berkelanjutan. Kedua, kepemilikan NPWP selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan melaporkan SPT oleh Wajib Pajak (Waluyo, 2007).

Pemahaman WP terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta sikap WP mempengaruhi perilaku perpajakan WP dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan (Sholichah, 2005). Menurut Zain (2008), kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan salah satunya disebabkan oleh ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu Wajib Pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.

2.1.7 Keadilan pajak

Menurut Adam Smith dalam Zain (2008), prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaklah berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara

membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara.

Mardiasmo (2009), mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Keadilan pajak oleh Siahaan (2010), dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

1. Prinsip Manfaat (*benefit principle*)

Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap Wajib Pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

2. Prinsip Kemampuan Membayar (*ability to pay principle*)

Pendekatan yang kedua yaitu prinsip kemampuan membayar. Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap Wajib Pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

3. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak:

a. Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama.

b. Keadilan Vertikal

Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam hal ini

nampak bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula.

2.1.8 Diskriminasi pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011), yang dilakukan di Yogyakarta dengan mengungkapkan bahwa keadilan pajak dan diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak, serta sistem perpajakan yang berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Irma suryani Rahman (2013), yang dilakukan di Jakarta dengan mengungkapkan bahwa variabel keadilan dan

diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak sedangkan variabel sistem perpajakan dan kemungkinan terjadinya terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Sri Putri Tita Mutia (2014), yang meneliti mengenai pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (*Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang*) yang menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dari kajian penelitian terdahulu, maka dapat diinventarisir hasil penelitian sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1 di bawah:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Data	Analisis Statistik	Hasil Penelitian
1	Nickerson, et al. (2009)	<p>Dependen : Etika Penggelapan pajak (<i>the ethics of tax evasion</i>)</p> <p>Independen : Fairness, the tax system, and discrimination</p>	Primer (Mahasiswa sarjana dan pascasarjana di 6 negara)	<i>Statistical test for population means and level of significance tests.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Studi menyatakan bahwa penggelapan pajak dapat dibenarkan atas dasar etika dari beberapa kasus. • Penggelapan pajak dibenarkan dalam kasus dimana sistem dipandang tidak adil. • Penggelapan pajak dibenarkan dalam kasus dimana

					pemerintah mendiskriminasi beberapa segmen dari populasi
2	Fagbemi, et al. (2010)	<p>Dependen : Etika Penggelapan pajak (<i>the Ethics of tax evasion</i>)</p> <p>Independen : Sistem perpajakan</p>	Primer (pemilik usaha di Lagos State, Nigeria)	- <i>Statistical test for population means and level of significance tests.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Studi menyatakan bahwa ada dukungan etis untuk menghindakan pajak. Berbagai tingkat pembenaran untuk penggelapan pajak yang ditunjukan oleh nilai <i>mean</i>
3	Suminarsasi (2011)	<p>Dependen : Etika Penggelapan pajak</p> <p>Independen: Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak</p>	Primer (wajib pajak orang pribadi di DIY)	<ul style="list-style-type: none"> - Uji F - Uji T 	<ul style="list-style-type: none"> • Keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak • Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak • Diskriminasi Pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan

					pajak.
3	Rahman (2013)	Dependen : Etika Penggelapan Pajak Independen : Keadilan, Sistem Perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan	Primer (Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta)	Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • keadilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. • Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. • Diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. • Kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
4	Mutia (2014)	Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Independen : Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman	Primer (Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang)	Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. • Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. • Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

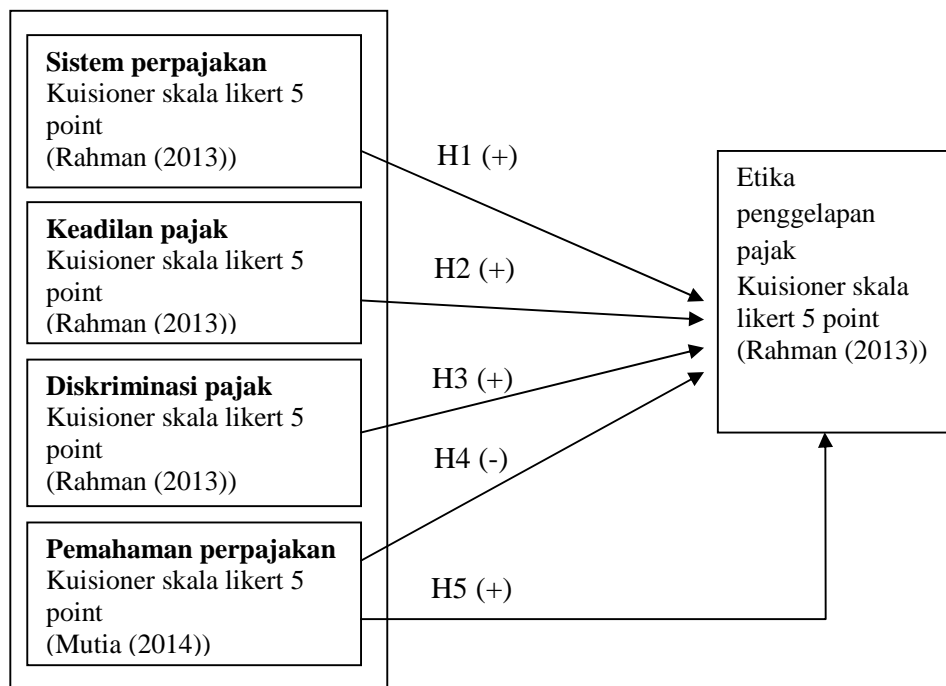
					<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
--	--	--	--	--	--

Sumber: data primer diolah, 2014

2.3 Kerangka Pemikiran

Variabel persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak dalam penelitian ini diduga dipengaruhi oleh variabel sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi pajak dan pemahaman perpajakan dari Wajib Pajak itu sendiri. Adapun model kerangka pemikiran yang dimaksud sebagaimana gambar

2.1 berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak

Sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah *self assessment system*, dimana Wajib Pajak diharapkan dapat dengan sadar melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Menurut Darmayanti (2004) dalam Mutikasari (2007), *Self Assessment System* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dan pengawasan lebih dari pemerintah agar jalannya pemungutan pajak tersebut terlaksana dengan baik. Sistem ini akan aktif diterapkan dalam suatu Negara apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang ada pada diri masyarakat telah terbentuk.

Dalam penelitian Supriyadi dan Suminarsasi (2011), menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak (hipotesis alternatif diterima). Hal ini berarti para Wajib Pajak menganggap bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Akan tetapi apabila sistem perpajakannya semakin tidak bagus, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nickerson *et al.*, (2009), yang menemukan dimensi skala etis dalam penggelapan pajak, salah satunya adalah dimensi sistem perpajakan. Peneliti berargumen bahwa pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang kompeten dan tidak korup, dan juga prosedur perpajakan yang tidak berbelit-belit akan membuat Wajib Pajak enggan untuk menggelapkan pajak. Akan tetapi, apabila pengelolaan

uang pajak tidak jelas, ditambah lagi petugas pajaknya justru mengorupsi uang pajak, maka Wajib Pajak enggan untuk melaporkan kewajibannya dengan jujur, mereka akan cenderung untuk menggelapkan pajak. Jadi hipotesis yang pertama adalah :

H₁ : Persepsi sistem perpajakan yang diukur dengan persepsi baik buruknya sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

2.4.2 Pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak

Menurut Mardiasmo (2009) dalam Suminarsasi dan Supriyadi (2011:6), mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011), menunjukan adanya pengaruh positif keadilan terhadap perilaku penggelapan pajak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh keadilan perpajakan dalam melakukan pembayaran pajak. Semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang Wajib Pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun, yang artinya kecenderungan melakukan penggelapan pajak semakin tinggi. Maka, hipotesis kedua adalah

H₂ : Keadilan pajak yang diukur dengan adilnya perlakuan perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

2.4.3 Pengaruh diskriminasi pajak terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak

Ketika diskriminasi dilakukan oleh aparat pajak, maka akan muncul pola pikir yang buruk kepada aparat pajak, sehingga wajib pajak tergerak untuk melakukan kegiatan penggelapan pajak dan menganggapnya bahwa hal tersebut adalah etis untuk dilakukan. Dalam penelitian yang dilakukan Suminarsasi (2010), membuktikan jika diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai perilaku penggelapan pajak. Dimana Variabel diskriminasi menunjukkan nilai koefisien regresi 0,966, t hitung = 8,222 dengan nilai $p = 0,000$; sedangkan t tabel pada tingkat signifikansi 5% adalah = 1,6517. Menurut t hitung $> t$ tabel ($8,222 > 1,6517$), dengan $p < 0,05$; variabel diskriminasi berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Selain itu, menurut nilai koefisien regresinya bertanda positif sesuai dengan tanda yang diharapkan untuk hipotesis ketiga, yaitu bertanda positif, maka hipotesis null berhasil ditolak, hipotesis ketiga terdukung.

Penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Nickerson, *et al.*, (2009), yang mengindikasikan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terkait dengan perilaku penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh McGee, *et al.*, (2007), juga menghasilkan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Jadi, apabila semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai

perilaku yang etis untuk dilakukan. Maka hipotesis yang ketiga dalam penelitian ini adalah :

H₃ : Diskriminasi pajak yang diukur dengan persepsi wajib pajak tentang perbedaan perlakuan aparat pajak terhadap wajib pajak berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

2.4.4 Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak

Pemahaman perpajakan oleh Wajib Pajak orang pribadi terhadap persepsi mengenai perilaku penggelapan pajak dikembangkan dengan melihat besar pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Tujuannya agar praktik pernggelapan pajak dapat diminimalisir dari kesalahan melaporkan dan membayar utang perpajakannya.

McGee (2009), dalam penelitiannya mengaitkan sistem perpajakan dan pemahaman Undang-Undang perpajakan dapat berjalan dengan semestinya serta kemungkinan penyalahgunaan dalam sistem apapun. Mengacu pada teori persepsi, timbulnya persepsi oleh individu dipengaruhi oleh stimulus-stimulus, salah satunya pemahaman terhadap objek, dalam hal ini pemahaman perpajakan. Wajib Pajak akan menganggap buruk dan cenderung menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan apabila pemahaman yang dimilikinya semakin baik. Dari pernyataan diatas, dapat dikembangkan sebuah hipotesis mengenai pengaruh dari pemahaman perpajakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap persepsi atas perilaku penggelapan pajak. Hardiningsih (2011), mengatakan bahwa Wajib Pajak

yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi Wajib Pajak yang tidak patuh. Hipotesis keempat yang diusulkan adalah:

H_4 : Pemahaman perpajakan yang diukur dengan tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

2.4.5 Pengaruh simultan variabel independen terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak

Hipotesis ini menguji secara bersama (simultan) variabel sistem perpajakan (X1), variabel persepsi keadilan pajak (X2), variabel diskriminasi pajak (X3), dan variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap variabel persepsi perilaku penggelapan pajak. Dalam melakukan analisis dengan lebih dari dua variabel independen, pengujian ini diperlukan untuk mengetahui pengaruh keempat variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H_5 : Sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh simultan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak, sedangkan variabel independen dari penelitian ini adalah persepsi sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi pajak dan pemahaman pajak. Cara pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5. Skala 1 menunjukkan bahwa responden sangat tidak setuju dengan pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Skala 2 menunjukkan bahwa responden tidak setuju dengan pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Skala 3 menunjukkan bahwa responden netral dengan pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Skala 4 menunjukkan bahwa responden setuju dengan pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Skala 5 menunjukkan bahwa responden sangat setuju dengan pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Adapun definisi dari variabel-variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1 Sistem perpajakan

Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai di dalam penerapannya, maka Wajib Pajak akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Begitupun sebaliknya, jika Wajib

Pajak merasa bahwa penerapan sistem perpajakannya belum baik, maka Wajib Pajak akan menurunkan tingkat kepatuhannya atau menghindari kewajiban perpajakannya.

Indikator sistem perpajakan mengacu pada penelitian Suminarsasi (2011) dan Rahman (2013) yang terdiri dari 5 (lima) pertanyaan menggunakan skala likert 5 (lima) poin.

3.1.2 Keadilan pajak

Keadilan pajak berkaitan dengan persepsi Wajib Pajak tentang prosedur, kebijakan dan peraturan perpajakan yang diterapkan oleh sistem perpajakan Indonesia dirasa sudah adil perlakuannya. Dalam hal ini, keadilan pajak dianggap adil ketika besaran pajak terutang sesuai dan proporsional dengan kemampuan Wajib Pajak masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara.

Indikator keadilan pajak mengacu pada penelitian Suminarsasi (2011) dan Rahman (2013) yang terdiri dari 6 (enam) pertanyaan menggunakan skala likert 5 (lima) poin yang dikembangkan dalam penelitian antara lain :

1. Penggunaan dana yang berasal dari pajak yang dipakai untuk kepentingan umum dan digunakan dengan benar;
2. Tarif pajak yang terlalu rendah;
3. Keadilan dalam penyusunan undang-undang perpajakan; dan
4. Ketidakadilan aparat pajak dalam melaksanakan ketentuan pajak.

3.1.3 Diskriminasi pajak

Diskriminasi pajak berkaitan dengan perbedaan perlakuan yang ditetapkan dari peraturan perpajakan dan perlakuan aparat pajak yang didasarkan dari perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

Indikator diskriminasi pajak mengacu pada penelitian Suminarsasi (2011) dan Rahman (2013) yang terdiri dari 4 (empat) pertanyaan menggunakan skala likert 5 (lima) poin yang dikembangkan dalam penelitian antara lain :

1. Perbedaan perlakuan didasarkan agama, ras dan kebudayaannya;
2. Perbedaan perlakuan akibat pendapat politiknya;
3. Zakat sebagai suatu pengurangan pajak; dan
4. Kebijakan kredit perbankan.

3.1.4 Pemahaman perpajakan

Pemahaman perpajakan berkaitan dengan seberapa jauh Wajib Pajak paham dengan ketentuan perpajakan secara menyeluruh, meliputi segala aspek mulai dari mendapatkan NPWP, pelaporan, hingga pembayaran pajak terutang.

Indikator pemahaman pajak mengacu pada penelitian Mutia (2014) yang terdiri dari 6 (enam) pertanyaan menggunakan skala likert 5 (lima) poin yang dikembangkan dalam penelitian antara lain :

1. Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya ketika paham sistem perpajakannya;
2. Tindakan penyidikan dan pemberhentian penyidikan yang dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi;
3. Penyampaian spt yang harus disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya; dan
4. Besaran sanksi yang didapat ketika terjadi keterlambatan bayar.

3.1.5 Persepsi atas perilaku penggelapan pajak

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku penggelapan pajak. Dari landasan teori yang telah dijabarkan bahwa penggelapan pajak merupakan suatu hal yang tidak etis untuk dilakukan, kecuali memang Wajib Pajak merasa bahwa perlakuan penggelapan pajaknya tersebut tidak terdeteksi oleh aparat pajak atau sanksi yang diberikan lebih kecil besarannya dibandingkan dengan manfaatnya. Variabel dependen ini diukur dengan mengajukan pertanyaan kepada Wajib Pajak berupa kuisisioner yang pertanyaannya mengenai persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak. Instrumen yang digunakan diambil dan dikembangkan dari penelitian Rahman (2013).

Indikator penggelapan pajak terdiri dari 7 poin pertanyaan dan diukur dengan menggunakan skala likert 5 (lima) poin. Pertanyaan yang dibuat mengacu pada penelitian Rahman (2013) yang dikembangkan dalam penelitian antara lain :

1. Perlakuan penggelapan pajak jika tarif yang diperlakukan terlalu tinggi;
2. Pengelolaan pajak yang tidak dikelola untuk kepentingan umum;
3. Manfaat yang didapat dari Wajib Pajak atas pajak yang dibayarkan

4. Hukum mengenai perpajakan lemah;
5. Adanya diskriminasi dalam perhitungan perpajakan; dan
6. Kinerja yang buruk dari aparat pajak dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh aparat pajak.

Dalam kuisioner ini, ketika responden memilih pilihan sangat setuju, maka perilaku penggelapan pajak dipersepsikan sebagai perilaku yang tidak etis dilakukan dalam pelaksanaan perpajakan. Dari uraian di atas, dapat dirinci mengenai definisi operatif pengukuran variabel yang dijabarkan pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Definisi Operatif Pengukuran Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala pengukuran
1.	Dependen: Persepsi perilaku penggelapan pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Perilaku penggelapan pajak • Tarif pajak terlalu tinggi • Manfaat yang dirasakan wajib pajak • Hukum yang lemah • Diskriminasi pajak 	8 pertanyaan	Skala ordinal yang di <i>convert</i> ke skala Interval
2.	Independen: Sistem perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> • Persepsi sistem pajak yang tidak adil • Pengenaan tarif pajak • Pengelolaan uang pajak • Sosialisasi Ditjen Pajak 	5 pertanyaan	Skala ordinal yang di <i>convert</i> ke skala Interval
3.	Keadilan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan uang pajak • Tingkat penghasilan • Penyusunan undang-undang • Pelaksanaan ketentuan pajak oleh fiskus 	6 pertanyaan	Skala ordinal yang di <i>convert</i> ke skala Interval
4.	Diskriminasi Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiskriminasian ras, agama dan kebudayaan • Pendapat politik • Zakat sebagai faktor 	4 pertanyaan	Skala ordinal yang di <i>convert</i> ke skala Interval

		pengurang pajak • Kepemilikan NPWP		
5.	Pemahaman Perpajakan	• Kemudahan dalam penggelapan pajak • Sanksi administrasi • Pelunasan utang pajak • Pengisian SPT	6 pertanyaan	Skala ordinal yang di <i>convert</i> ke skala Interval

Sumber: data primer diolah, 2014

3.2 Populasi dan sampel

Populasi mengacu pada kumpulan kelompok orang, kejadian atau hal lain yang ingin diinvestigasi (Sekaran, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang tinggal di Kota Purworejo yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Purworejo, yang melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengambilan data dilakukan di KPP Pratama Purworejo dikarenakan KPP Pratama Purworejo menjadi KPP terbaik di Kanwil Jawa Tengah pada tahun 2012, dimana jumlah Wajib Pajak yang memasukan SPT di Kabupaten Purworejo melampaui realisasi nasional. Yakni, pada tingkat nasional realisasinya 70 persen, sedangkan KPP Pratama Purworejo mencapai 79 persen dengan total Wajib Pajak di Purworejo sekitar 56.000 orang (Suara merdeka, 2013).

Berdasarkan unit analisis di atas, maka dapat diketahui jumlah populasi untuk Kantor Pratama Pajak sebagaimana tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2 Kerangka Populasi di Kantor Pajak Pratama Purworejo	
Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2014 (Sampai Agustus 2014)	69.192

Sumber: Data KPP Pratama Purworejo, yang telah diolah, 2014

Dari tabel tersebut diketahui populasi penelitian tahun 2014 sebanyak 69.192 orang. Oleh karena populasi penelitian dirasakan terlalu besar, maka diambil sampel dengan menggunakan rumus Slovin untuk menghitung ukuran sampel didasarkan pada pendugaan proporsi populasi (Arikunto, 2004 dalam Rahmadi, 2014).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer berupa kuesioner yang diberikan kepada responden dan data mengenai gambaran umum instansi yang didapat dari narasumber. Kuesioner dalam penelitian ini adalah kuesioner personal (*Personal Administreated Questionnaires*), yaitu proses pengumpulan data dengan menggunakan pernyataan tertulis yang ditujukan pada responden yang berada di dalam unit observasi (Indrianto dan Supomo, 1999). Dalam proses pendistribusian kuesioner ini peneliti memberikan penjelasan singkat mengenai tata cara pengisian dan memberikan waktu kepada responden untuk mengisi kuesioner tersebut. Data yang diterima dalam kuesioner berupa data ordinal. Untuk memenuhi salah satu syarat regresi linear berganda , yaitu bahwa skala yang diperbolehkan untuk diolah adalah skala interval dan rasio, maka data di *convert* menjadi skala interval menggunakan metode transformasi. Metode transformasi yang digunakan yaitu *Method of Successive interval* (Hays, 1976) dengan bantuan makro mini tab. Pada umumnya jawaban responden yang diukur menggunakan skala likert diadakan *scoring* yaitu pemberian nilai numerikal 1,2,3,4, dan 5. Setiap skor yang diperoleh akan memiliki tingkat pengukuran

ordinal. Nilai numerikal tersebut dianggap sebagai objek dan selanjutnya melalui proses transformasi ditempatkan ke dalam interval.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode angket (kuesioner). Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert 5 tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut:

Angka 1= Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.5 Metode Analisa Data

Analisis data penelitian ini dengan menggunakan regresi linier berganda, yaitu metode analisis untuk lebih dari satu variabel independen. Penelitian ini menggunakan program pengolahan data yaitu SPSS versi 20. Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang terdiri dari:

3.5.1 Statistik deskriptif

Statistik deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi dan akurasi sampel data penelitian. Kualitas data yang dihasilkan dari instrumen penelitian dievaluasi dengan uji validitas dan uji reliabilitas Hair dalam Ghozali (2011).

3.5.2 Uji kualitas data

3.5.2.1 Uji validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya kuisioner penelitian. Uji dilakukan dengan membandingkan koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel mengindikasikan item tersebut valid. Sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel berarti item penelitian tidak valid untuk digunakan (Ghozali, 2011).

3.5.2.2 Uji reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur kuisioner penelitian yang merupakan indikator dari konstruk atau variabel. Menurut Ghozali (2011), kuisioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan menghitung besarnya nilai Cronbach's alpha masing-masing instrumen dari suatu variabel. Suatu variabel dikatakan reliabel jika besarnya nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,7 (Ghozali, 2011).

3.5.3 Uji normalitas

Uji Normalitas menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Indikator model regresi yang baik adalah memiliki data terdistribusi normal. Menurut Ghozali (2011), ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat analisis grafik atau uji statistik. Jika menggunakan grafik, normalitas dapat dideteksi dengan melihat tabel histogram.

Untuk jumlah sampel yang kecil dapat dibantu dengan melihat normal probability plot, membandingkan distribusi kumulatif data asli dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2011). Untuk menguji normalitas residual pada uji statistik dapat digunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S), dengan membuat hipotesis:

- 1) H_0 : Data residual terdistribusi normal
- 2) H_A : Data residual tidak terdistribusi normal

3.5.4 Uji hipotesis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak

α = konstanta

$\beta_1 X_1$ = koefisien regresi sistem perpajakan

$\beta_2 X_2$ = koefisien regresi keadilan pajak

$\beta_3 X_3$ = koefisien regresi diskriminasi pajak

$\beta_4 X_4$ = koefisien regresi pemahaman pajak

e = *error*

3.5.4.1 Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien ini bertujuan mengukur seberapa jauh model regresi dapat menerangkan variabel-variabel dependen penelitian. Nilai koefisien R^2 antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menandakan kemampuan variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variabel-variabel dependen terbatas (Ghozali, 2011). Nilai mendekati satu, berarti hampir semua variabel dependen dapat diterangkan oleh variabel-variabel independen.

3.5.4.2 Uji statistik F

Uji Statistik F mengukur apakah semua variabel independen yang ada pada penelitian mempunyai pengaruh secara bersama, simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Pada derajat 10%, hipotesis alternatif diterima dan semua variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen.

3.5.4.3 Uji signifikansi parameter individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t menunjukkan tingkat pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Uji t digunakan menguji pengaruh variabel independen masing-masing. Dengan menggunakan t tabel, pada uji t, nilai t yang dihitung akan dibandingkan dengan nilai t pada tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel, hipotesis awal diterima dan H_0 ditolak. Sebaliknya, apabila besarnya nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel maka hipotesis awal (H_a) ditolak dan H_0 diterima (Ghozali, 2011).